

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(R K P D)
Kabupaten Balangan
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

f

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
12. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan RKPD penjabaran tahun ke-1 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjarangan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2022;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2022.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2022 dengan DPRD.

BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan penyesuaian;
- d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. penyesuaian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2020 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN KENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal terjadi:
- perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. YULIANSYAH



2.4.2 Iklim Berinvestasi

A. Kemudahan Perijinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam bidang pelayanan perizinan tersebut, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Balangan. Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission-OSS). Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPT tahun 2019 dipilah menjadi pelayanan perizinan dengan OSS dan pelayanan perizinan non OSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.111

Tabel 2.111
Produk Layanan OSS DPMPTSP Beserta Lama Waktu Pelayanan
Kabupaten Balangan

No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
1	Izin Usaha Perkebunan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
2	Izin Usaha Tanaman Pangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
3	Izin Usaha Hortikultura	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
4	Izin Usaha Peternakan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
5	Pendaftaran usaha Perkebunan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-



No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
6	Pendaftaran usaha Tanaman Pangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
7	Pendaftaran usaha Budi Daya Hortikultura	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
8	Pendaftaran usaha Peternakan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
9	Izin Usaha Industri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
10	Izin Usaha Kawasan Industri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
11	Izin Perluasan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
12	Izin UsahaJasa Penunjang Tenaga Listrik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
13	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
14	Izin Operasi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
15	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
16	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
17	Izin Penyelenggaraan Saeana Perkeretaapian Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
18	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
19	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Orang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
20	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
21	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
22	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Lintas Antar Propinsi dan atau Antar Negara	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
23	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
24	Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
25	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
26	Izin Pelabuhan Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
27	Izin Usaha Angkutan Laut	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
28	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
29	Izin Usaha Angkutan Laut di Perairan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
30	Persetuan Kegiatan Kerja Keruk	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
31	Penetapan Terminal Khusus yang terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-



No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
32	Izin mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
33	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
34	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
35	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
36	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
37	Izn Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
38	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
39	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
40	Izin Toko Alat Kesehatan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
41	Izin Mendirikan Rumah Sakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
42	Izin Operasional Rumah Sakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
43	Izin Operasional Klinik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
44	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
45	Izin Apotek	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
46	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
47	Izin Toko Obat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
48	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
49	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
50	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
51	Ijin Lembaga Pelatihan Kerja	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
52	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
53	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-



No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
54	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hutan Produksi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
55	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
56	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
57	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
58	Izin Pembuangan Air Limbah	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
59	Surat Izin Usaha Perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
60	Izin Pelaksanaan Reklamasi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
61	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
62	Surat Izin Penangkapan ikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
63	Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
64	Tanda Daftar Bagi Pembudi daya ikan Kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
65	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
66	Tanda Daftar Usaha Penggaraman Bagi Petambak garam kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
67	Buku Kapal Perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
68	Ijin Usaha Jasa Kontruksi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
69	Surat Ijin Peil Banjir	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
70	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
71	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
72	Pengesahan Pertelaan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
73	Sertifikat HMRS an Developer	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
74	Sertifikat Hak Milik HMRS atas Nama Pembeli	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
75	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
76	Izin Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
77	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
78	Izin Pembukaan Kantor cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-



No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
79	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
80	Surat Ijin Perdagangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
81	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
82	Tanda Daftar Gudang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-

Sumber : DPMPST Kabupaten Balangan, 2020

B. Sumber Daya Manusia

a) Rasio Ketergantungan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan terus mengalami penambahan. Jika pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Balangan berjumlah 124.913 jiwa, di tahun 2020 jumlahnya naik menjadi 132.103 jiwa. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2017 dengan penambahan penduduk sebanyak 2.599 jiwa, atau 2,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk harus terus dilakukan karena ledakan penduduk dapat berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu, yang tidak kalah penting, adalah menjaga rasio ketergantungan penduduk. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif. Usia penduduk tidak produktif berkisar antara 0-14 tahun, dan berusia 65 tahun ke atas. Keduanya disebut juga dengan penduduk bukan angkatan kerja. Sedangkan penduduk usia produktif berkisar antara 15-64 tahun dan biasa disebut juga dengan penduduk angkatan kerja.

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Balangan sebesar 41 persen pada tahun 2020, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 41 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 41 ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 33.707 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 4.704. Rasio ketergantungan ini termasuk kategori tinggi terutama penduduk muda, namun ini merupakan bonus demografi sebagai peluang yang dimiliki Kabupaten Balangan di masa yang akan datang.

Banyaknya usia produktif ini membawa konsekuensi dalam upaya penyediaan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa wirausaha maupun fasilitasi pengembangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
														Nasional	Daerah				
3	31	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROFIL IKM YANG BERKEMBANG	3,58 %		0,19 %	0,38 %	889.440.000					0,38 %	80.475.000			
3	31	4	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan informasi	6 laporan		1 laporan	1 laporan	889.440.000					1 laporan	80.475.000			
3	31	4	2.01	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang didata				2589 IKM	89.440.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	IKM	80.475.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	4	2.01	2 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas						800.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	IKM	000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2.588.869.600				8.640.000.000					
2	7	2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	30 %		0 %	30 %	121.422.000					30 %	100.000.000			
2	7	2	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK)	70 %		70 %	70 %	121.422.000					70 %	100.000.000			
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja				1 dokumen										
2	7	2	2.01	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						121.422.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	SKPD terkait	1 dokumen	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenga kerja yang kompetensi/bersertifikat kompetensi	4 %		9,31 %	4 %	1.878.645.100					4 %	7.891.000.000			
2	7	3	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi	%		%	13.87 %	1.701.975.100					13.87 %	7.721.000.000			
					Jumlah paket pelatihan klaster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan				1 Paket pelatihan		Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pencari kerja	1 Paket pelatihan	2.906.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					321.668.750									
2	7	3	2.01	1 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MoU dengan pihak ketiga				3 Paket Pelatihan		225.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pencari kerja	3 Paket Pelatihan	315.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
					Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK				100 Persen		1.155.306.350	Kab. Balangan, Batu Mandi, Mampari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pencari kerja	100 Persen	4.500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	7	3	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS (kejuruan) terakreditasi	2 LPK		3 LPK	3 LPK	92.970.000						3 LPK	95.000.000		
					Jumlah LKPS terdaftar di OSS/memiliki izin				10 LPK		92.970.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	10 LPK	95.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
					Jumlah LPKS terakreditasi				3 LPK								3 LPK		
					Jumlah lulusan LPKS yang kompeten				100 orang								100 orang		
2	7	3	2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah pelaku usaha kecil yang mengikuti konsultasi peningkatan produktivitas	20 orang		20 orang	20 orang	83.700.000						20 orang	75.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Prioritas Daerah	Target		Pagu Indikatif
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah peserta konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil				20 orang	83.700.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pelaku usaha kecil	20 orang	75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	65 %		64,25 %	65 %	222.122.500						65 %	275.000.000	
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	1500 orang		1500 orang	1500 orang	222.122.500						1500 orang	275.000.000	
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan perantaraan kerja				750 orang	124.532.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pencari Kerja	750 orang	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan				5 orang	38.195.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pencari Kerja	5 orang	65.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKM/ Wirausaha Baru				20 orang	59.395.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pencari Kerja	20 orang	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	%		%	100 %	366.680.000						100 %	374.000.000	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	14 %		10 %	10 %	110.620.000						10 %	108.000.000	
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen informasi sarana HI setiap tahun				1 dokumen	110.620.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Perusahaan	1 dokumen	108.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah monitoring perusahaan				5 kali							5 kali		
						Jumlah pembinaan aturan ketenagakerjaan				3 kali							3 kali		
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui mediasi	80 %		80 %	80 %	256.060.000						80 %	266.000.000	
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pencegahan PHI				2 kali	216.850.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Buruh dan Perusahaan	2 kali	230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHI yang difasilitasi				3 kasus	39.210.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Buruh dan Perusahaan	3 kasus	36.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						9.578.753.900							10.024.590.500	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	78,20 (BB) Nilai		68,40 (B)) Nilai	70,40 (BB) Nilai	9.075.603.900						70,40 (BB) Nilai	9.510.474.000	
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %		100 %	100 %	101.280.000						100 %	106.828.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun				2 dokumen	11.900.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	2 dokumen	12.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA- SKPD				1 dokumen	13.124.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	1 dokumen	13.781.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	6.184.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	1 dokumen	6.964.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD				1 dokumen	10.404.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	1 dokumen	10.925.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	6.184.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lingkup SKPD	1 dokumen	6.494.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				2 laporan	47.300.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	2 laporan	49.670.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun				8 laporan	6.184.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	8 laporan	6.494.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	7.289.058.100						100 %	7.790.926.000	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan				100 %	6.894.449.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	100 %	7.468.752.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 bulan	358.320.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	12 bulan	284.067.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi dan keuangan				12 laporan	7.684.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	12 laporan	8.069.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 laporan	7.684.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	1 laporan	8.069.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan				2 dokumen	7.684.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	2 dokumen	8.069.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran				2 laporan	7.684.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	2 laporan	8.069.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran				2 laporan	5.552.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	2 laporan	5.831.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	281.900.000						100 %	188.622.000	
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya				43 Stel	37.500.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	ASN	43 Stel	52.206.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah pakaian kedaerahan				45 Stel							45 Stel		
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				20 OK	244.400.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	ASN	20 OK	136.416.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %		100 %	100 %	263.381.400						100 %	276.752.000	
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				80 Buah	20.205.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	80 Buah	21.217.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				10 Buah	10.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	10 Buah	10.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				234 Pak	35.616.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	234 Pak	37.397.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				40000 Lembar							40000 Lembar		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan				3 Bahan bacaan	4.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	3 Bahan bacaan	4.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				252 orang/ hari	193.560.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	252 orang/ hari	203.238.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 buah		3 buah	0 buah	000						0 buah	000	
2	18	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan				0 Buah		Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	0 Buah	000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan				0 Buah		Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	0 Buah	000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan				0 buah		Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	0 buah	000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	707.394.400						12 bulan	711.144.000	
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan		Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	12 Bulan	000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				12 Bulan	383.100.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	12 Bulan	402.255.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	324.294.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	12 Bulan	308.889.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	432.590.000						100 %	436.202.000	
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin berkala				4 buah	324.350.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	4 buah	340.568.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah				
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 bulan	108.240.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	12 bulan	95.634.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 bulan	000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Lingkup SKPD	12 bulan	000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	10 Kerjasama		2 Kerjasama	2 Kerjasama	62.370.000					2 Kerjasama	81.277.000		
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan draft Perda dan Perbup Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100 %		100 %	20 %	36.300.000					20 %	52.591.000		
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda dan Perbup mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal				2 Perda/Perbup	36.300.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pelaku Usaha / Perusahaan	2 Perda/Perbup	52.591.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	26.070.000					1 dokumen	28.686.000		
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupeten/Kota				1 dokumen review RUPM	11.850.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pelaku Usaha / Perusahaan	1 dokumen review RUPM	13.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Terupdate				1 dokumen peta potensi	14.220.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pelaku Usaha / Perusahaan	1 dokumen peta potensi	14.936.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	110.000.000.000 Rupiah		200.000.000.000 Rupiah	200.000.000.000 Rupiah	65.640.000					200.000.000.000 Rupiah	68.923.000		
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Potensi Investasi Daerah yang diminati	10 kegiatan		3 kegiatan	2 kegiatan	65.640.000					2 kegiatan	68.923.000		
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah calon investor yang berminat investasi				2 investor	16.650.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pelaku Usaha / Perusahaan	2 investor	17.483.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah item media promosi				5 item						5 item			
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi investasi				2 kegiatan	48.990.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pelaku Usaha / Perusahaan	2 kegiatan	51.440.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Jumlah promosi potensi investasi daerah yang diminati				1 laporan						1 laporan			
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	133.400.000					100 %	132.744.500		
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100 %		100 %	100 %	133.400.000					100 %	132.744.500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai Standar Pelayanan			100 %	14.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Masyarakat	100 %	14.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Izin yang dievaluasi			100 %	22.490.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Masyarakat	100 %	23.639.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase konsultasi dan pengaduan diselesaikan			100 %	52.050.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Masyarakat	100 %	51.765.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani			100 %	44.860.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Masyarakat	100 %	42.640.500	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %		100 %	95.830.000						100 %	92.252.000		
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	100 %		100 %	95.830.000						100 %	92.252.000		
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan penanaman modal			100 Laporan	14.520.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pelaku Usaha / Perusahaan	100 Laporan	15.341.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu			25 Perusahaan	31.210.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pelaku Usaha / Perusahaan	25 Perusahaan	34.648.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya			25 Perusahaan	50.100.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif	Pelaku Usaha / Perusahaan	25 Perusahaan	42.263.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100 %		100 %	145.910.000						100 %	138.920.000		
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100 %		100 %	145.910.000						100 %	138.920.000		
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data penanaman modal yang tersedia			1 data	145.910.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Masyarakat	1 data	138.920.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
						Jumlah data perizinan dan non perizinan			20 data								20 data		
						Jumlah layanan informasi penanaman modal			1 dokumen								1 dokumen		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah				
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Jumlah layanan informasi perizinan dan non perizinan				6 layanan						6 layanan			
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						226.457.000						115.000.000		
3	32	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	%		%	18.91 %	226.457.000						18.91 %	115.000.000	
3	32	4	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Luas Lahan yang dapat dikelola oleh warga transmigrasi di kawasan transmigrasi	Ha		Ha	64.5 Ha	226.457.000						64.5 Ha	115.000.000	
	32	4	2.01	1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah frekuensi Kegiatan Penguatan SDM				2 kali	50.730.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kawasan Transmigrasi	2 kali	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	32	4	2.01	2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan				2 Paket	175.727.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kawasan Transmigrasi	2 Paket	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						15.241.181.400							3.148.025.576	
	19	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber DayaAparatur; Nilai SAKIP SKPD	%		%	100 %	6.860.814.700						100 %	1.124.891.356	
	19	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun "Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD "	dokumen eks		dokumen eks	7 dokumen 3 eks	154.810.000						7 dokumen 3 eks	137.390.000	
	19	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.910.000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Pegawai Disporapar		33.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	19	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan realisasi keuangan				20 dokumen	150.900.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Pegawai Disporapar	20 dokumen	104.390.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	19	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	5.660.354.700						100 %	000	
	19	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.660.354.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	PNS DISPORAPAR		000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	19	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan" Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang Orang		Orang Orang	25 Orang 25 Orang	127.000.000						25 Orang 25 Orang	84.000.000	
	19	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						37.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Karyawan dan Karyawati DISPORAPAR		40.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	19	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						90.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Karyawan dan Karyawati DISPORAPAR		44.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
					Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		